

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA: STRATEGI MENUJU KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN

AGRICULTURAL DEVELOPMENT POLICY TRANSFORMATION IN INDONESIA: STRATEGIES TOWARDS SUSTAINABLE FOOD SECURITY

**Nurhapsa^{1*}, Muhammad Arsyad², Andi Nuddin¹, Suherman³, Siti Nurani
Sirajuddin⁴, Nurul Magfirah Ashar², Mukhlis⁵**

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia

²Department Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

³Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia

⁴Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

⁵Program Studi Agribisnis, Jurusan Bisnis Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Indonesia

*Email Penulis korespondensi: hapsa_faktan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Transformasi kebijakan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani serta memenuhi tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu penting untuk dikaji tentang bagaimana memberdayakan usaha kecil di sektor pangan agar lebih produktif dan berkelanjutan serta bagaimana mempromosikan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. Jenis penelitian kualitatif dengan metode literatur review. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketahanan pangan berkelanjutan dapat dicapai dengan strategi membangun penyediaan pangan berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional, memberdayakan usaha skala kecil yang bergerak di bidang pangan yang merupakan ciri dominan pada perekonomian pertanian Indonesia, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis, penyuluhan terkait dengan diversifikasi tanaman untuk efisiensi usaha dan mempercepat diseminasi teknologi, mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan, pengolahan, dan distribusi pangan, mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan berdasarkan potensi sumberdaya pangan lokal, keragaman makanan daerah, dan kearifan lokal, memperbaiki status gizi masyarakat melalui pengayaan atau fortifikasi untuk zat gizi tertentu pada pangan yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat, seperti beras, minyak goreng, dan garam, mengupayakan agar tercipta kemampuan untuk menjamin pangan yang diedarkan atau diperdagangkan kepada masyarakat mempunyai karakteristik aman, higienis, berkualitas, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, memperkuat dan memfasilitasi pengembangan pemasaran dan perdagangan pangan di perdesaan yang efisien, pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, menggunakan instrumen kebijakan perdagangan internasional pangan dengan mendahulukan pertimbangan kepentingan nasional dan selaras dengan kesepakatan internasional, revitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat yang dikelola dengan prinsip efisiensi ekonomi dengan tetap memiliki fungsi sosial, pemberian bantuan pangan bersubsidi sesuai dengan pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang kekurangan pangan.

Kata kunci: Transformasi kebijakan pertanian, ketahanan pangan nasional, diversifikasi pangan, pemberdayaan usaha kecil

ABSTRACT

Agricultural policy transformation aims to increase productivity, sustainability, and farmers' welfare while meeting the demands of economic, social, and environmental developments. This will have an impact on national food security. Therefore, it is important to study how to empower small businesses in the food sector to be more productive and sustainable and how to promote food diversification based on local

potential and local wisdom. This study aims to analyze the transformation of agricultural development policies in Indonesia and its impact on national food security. The type of research is qualitative with a literature review method. The results of the analysis show that sustainable food security can be achieved with the strategy of building food supply from domestic production and national food reserves, empowering small-scale businesses engaged in the food sector which is a dominant feature of the Indonesian agricultural economy, increasing the capacity of farmers through training and technical assistance, counseling related to crop diversification for business efficiency and accelerating technology dissemination, promoting food loss reduction through the utilization of food handling, processing and distribution technology, promoting food consumption diversification based on the potential of local food resources, regional food diversity, and local wisdom, improving the nutritional status of the community through enrichment or fortification of certain nutrients in foods consumed by most people, such as rice, cooking oil and salt, striving to create the ability to ensure that food distributed or traded to the public has safe, hygienic, quality, nutritious characteristics, and does not conflict with religion, beliefs and culture of the community, strengthening and facilitating the development of efficient food marketing and trade in rural areas, management of basic food reserves of central and local governments to maintain stability of food supply and prices, using international food trade policy instruments by prioritizing national interest considerations and in line with international agreements, revitalizing the community food barn institutional system into a community food reserve system managed with the principle of economic efficiency while still having a social function, providing subsidized food assistance in accordance with local food consumption patterns for the poor and food-insecure communities.

Keywords: Agricultural policy transformation, national food security, food diversification, small business empowerment

PENDAHULUAN

Negara yang memiliki lahan yang luas, kondisi geografis dan iklim yang menguntungkan maka sektor pertanian menjadi sangat strategis (Gemmell, 2017). Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, yang berperan penting dalam menyediakan kebutuhan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, khususnya di pedesaan. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia yaitu sebesar 13,28% terhadap PDB nasional, menyerap lebih dari 29% tenaga kerja dan nilai ekspor hasil pertanian mencapai USD 4,24 milyar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola pangan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan warga, yang merupakan salah satu kewajiban pemerintah terhadap masyarakat dalam mencapai hak atas pangan (Kaputra, 2013). Namun, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Indonesia seperti perubahan iklim, degradasi sumberdaya alam (lahan), keterbatasan teknologi dan infrastruktur, tingkat kesejahteraan petani yang rendah. Tantangan tersebut mengharuskan pemerintah untuk melakukan transformasi kebijakan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan pembangunan pertanian yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dengan pengembangan pertanian adaptif iklim seperti mendorong petani untuk menggunakan varietas yang tahan terhadap kekeringan dan banjir (Wahyudi, 2012).

Transformasi merupakan segala perubahan baik yang terjadi secara fisik maupun nonfisik, seperti sifat dasar, fungsi, dan struktur (Fahmi, 2021). Proses transformasi kebijakan pertanian melibatkan pergeseran paradigma, strategi, dan pendekatan dalam perumusan serta implementasi kebijakan pertanian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sebagai contoh transformasi kebijakan pertanian di Indonesia pada masa orde baru, kebijakan pembangunan pertanian lebih berfokus pada peningkatan produksi

pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik melalui program BIMAS dan INMAS. Program BIMAS dan INMAS ini menggunakan teknologi yang lebih moderen dan penggunaan pupuk kimia. Namun kebijakan ini juga mengalami berbagai kendala karena bergantung kepada bahan impor, ketergantungan pada teknologi luar negeri dan tidak merata distribusinya. Beberapa dekade terakhir, kebijakan pembangunan pertanian lebih berfokus pada keberlanjutan dan ketahanan pangan dengan kebijakan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

Transformasi di bidang pertanian menurut Murdiyanto (2020) sebagai proses perubahan pada berbagai aspek di bidang pertanian, bukan hanya pada teknologi namun juga pada aspek kelembagaan ekonomi dan sosial pertanian. Transformasi pertanian perdesaan merupakan perubahan dalam bentuk, karakteristik, struktur, dan kapasitas sistem pertanian yang mampu mendorong pertumbuhan, pengembangan, serta memperkuat perekonomian masyarakat desa (Fahmi, 2021). Menurut Briones and Felipe (2013) transformasi pertanian kemungkinan akan terus terjadi sesuai dengan histori yang ada. Walaupun akan berdampak pada ketidakstabilan pasar atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Transformasi kebijakan pertanian sering dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adanya perubahan atau perkembangan teknologi di sektor pertanian (misalnya digitalisasi dan otomatisasi), perubahan iklim dan kebutuhan akan praktik pertanian berkelanjutan, globalisasi pasar yang mendorong peningkatan daya saing produk pertanian, kebutuhan diversifikasi ekonomi di daerah pedesaan, tuntutan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Transformasi kebijakan pertanian akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Menurut Mukhlis, *et al*, (2023) salah satu masalah pembangunan ekonomi ketahanan pangan yang keropos dan penurunan kualitas lingkungan. Solusi untuk masalah pembangunan ekonomi adalah penerapan pertanian berkelanjutan.

Ketahanan pangan menjadi fokus bersama yang perlu ditingkatkan dengan mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Sampai saat ini, Indonesia memiliki skor yang cukup baik untuk keterjangkauan pangan, tetapi perlu memperbaiki aspek ketersediaan, kualitas pangan, serta ketahanan dan keberlanjutan sumber daya alam. Untuk itu, pemerintah mendorong upaya transformasi pertanian dengan pembangunan pertanian yang inklusif dan efisien dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan, seperti pengembangan *Closed Loop* Hortikultura, pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan CSV (*Creating Shared Value*), pengendalian alih fungsi lahan sawah, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas akses pembiayaan.

Menurut (FAO, 2019), ketahanan pangan merupakan situasi dimana semua orang setiap saat dapat mengakses makanan yang cukup secara fisik maupun ekonomi yang aman, bergizi untuk hidup sehat dan aktif. Konsep ketahanan pangan juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Raihan et al, 2020). Penerapan konsep ketahanan pangan ditujukan untuk menyatakan ketahanan pangan pada beberapa tingkatan yaitu, global, nasional, regional, tingkat rumah tangga dan individu. Faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga (Sinaga, et al, 2017; Taufik *et al*., 2021).

Menurut Adriani and Bambang (2012) bahwa ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem, yaitu: (1) ketersediaan Pangan (*Food Availability*) dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan; 2) Akses Pangan (*Food Access*) atau keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi dan pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan; 3) Penyerapan pangan (*Food Utilization*) atau pemanfaatan pangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan status gizi masyarakat.

Seiring dengan pertambahan populasi penduduk dunia yang diprediksi mengalami kenaikan sekitar hingga 9,8 miliar pada 2050 tentu akan membutuhkan peningkatan produksi pangan. Pertambahan populasi ini akan mendorong peningkatan kebutuhan yang besar terhadap pangan, air, dan energi. Namun, berbagai tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan fluktuasi harga komoditas global mengharuskan pemerintah untuk melakukan transformasi kebijakan pembangunan pertanian. Tujuan utama transformasi ini adalah mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Salikin (2011); Mukhlis *et al*, (2023) pertanian berkelanjutan mengarah kepada sistem pertanian yang tidak merusak, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan. Pertanian berkelanjutan bisa sebagai alternatif meningkatkan ketahanan pangan. Dipertegas oleh Nurhapsa *et al*, (2025) Keberhasilan usaha yang berkelanjutan dipengaruhi oleh keterlibatan beberapa pihak termasuk petani. Petani merupakan subjek yang terlibat langsung dalam pelaksanaan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* yang bertujuan untuk melakukan analisis dari berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan transformasi kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan berkelanjutan. Literatur review ini menggunakan artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi, kredibilitas sumber, dan kualitas metodologi yang digunakan dalam setiap studi.

Tahap pertama yang dilakukan adalah pemilihan dan pengumpulan literatur yang terkait dengan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Hasil penelitian yang dipilih adalah mencakup kebijakan pertanian nasional, pemberdayaan petani, strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Literatur yang terpilih dianalisis secara terstruktur untuk mengidentifikasi berbagai perspektif dan pendekatan yang telah digunakan pada penelitian tentang kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Selain itu, analisis tematik juga bertujuan untuk menggali kontribusi setiap hasil penelitian tentang transformasi kebijakan pertanian dan dampaknya terhadap sistem pangan di Indonesia. Selanjutnya hasil analisis literatur akan digabungkan untuk menarik kesimpulan yang mencakup rekomendasi kebijakan dan potensi penelitian yang akan datang. Penulis akan menyarankan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui pembangunan pertanian yang terintegrasi. Dengan menggunakan pendekatan *literature review*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam kebijakan pertanian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kebijakan Pertanian

Kebijakan pertanian di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi seiring dengan perubahan kepemimpinan dan tantangan zaman. Pada masa orde lama (1945-1966), kebijakan pembangunan pertanian difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan domestik melalui program swasembada pangan terutama padi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pasca kemerdekaan, program rencana kasimo pada tahun 1948 dengan menekankan pada peningkatan produksi beras melalui penyediaan lahan baru dan irigasi. Landasan ideologi yang digunakan pada masa orde lama yaitu pertanian dilihat sebagai sektor utama dalam membangun kemandirian ekonomi, program *land reform* (UU No. 5 Tahun 1960) berusaha mendistribusikan tanah kepada petani kecil untuk mengurangi kesenjangan agraria, namun implementasinya kurang optimal. Namun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pada masa orde lama yaitu instabilitas politik dan ekonomi yang menghambat pelaksanaan kebijakan, kurangnya teknologi dan infrastruktur pertanian yang memadai.

Pada masa orde baru (1966-1998), kebijakan pertanian menggunakan pendekatan modernisasi dengan fokus pada revolusi hijau (penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida dan mekanisasi), peningkatan produktifitas beras melalui program intensifikasi pertanian (BIMAS, INMAS) dan pencapaian swasembada beras pada tahun 1984. Pada masa orde baru kebijakan pertanian juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur (pembangunan jaringan irigasi secara masif) untuk menunjang peningkatan produktifitas pertanian, pendirian Bulog untuk stabilisasi harga dan pengelolaan stok beras. Tantangan yang dihadapi pada penerapan kebijakan pertanian pada masa ini adalah ketergantungan pada input kimia sehingga dapat merusak lingkungan dan ketimpangan distribusi lahan tetap menjadi isu besar.

Kebijakan pertanian pada era reformasi (1998-sekarang) lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan yaitu desentralisasi dan otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan sektor pertanian, diversifikasi pangan dengan mengembangkan komoditi non beras seperti jagung, kedelai dan komoditi hortikultura, keberlanjutan dan teknologi yang fokus pada pertanian organik dan ramah lingkungan, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pemasaran hasil pertanian (*smart farming*). Penerapan kebijakan pertanian pada masa ini menghadapi tantangan berupa terjadinya perubahan iklim dan penurunan kualitas lahan yang berpengaruh terhadap produktifitas pertanian, persaingan global dan keterbukaan pasar melalui perjanjian perdagangan internasional.

Dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024), kebijakan pertanian difokuskan pada pembangunan infrastruktur penunjang (bendungan, irigasi, jalan desa) yang menunjang distribusi hasil pertanian, kemandirian pangan melalui program perhutanan sosial untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan dan bantuan alsintan serta subsidi pupuk. Agar kebijakan tersebut dapat efektif pelaksanaannya, maka perlu disosialisasikan dan diberi pelatihan atau pendidikan dari instansi terkait (Kesa and Lee, 2013). Selain itu kebijakan pada masa ini juga mendorong ekspor produk pertanian unggulan (kopi, sawit, rempah-rempah) dan peningkatan stok cadangan pangan untuk menghadapi krisis global, pemanfaatan teknologi melalui aplikasi *e-tani* dan *start up* agribisnis.

Transformasi kebijakan pertanian di Indonesia menunjukkan adaptasi terhadap tantangan domestik dan global. Dari fokus swasembada pangan di masa orde lama hingga pendekatan keberlanjutan dan teknologi di era modern, kebijakan pertanian terus berkembang untuk memastikan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan

keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya transformasi pertanian berkontribusi terhadap peningkatan lapangan pekerjaan sehingga secara otomatis akan menurunkan tingkat angka pengangguran lebih banyak sehingga lebih banyak orang yang memperoleh pendapatan bukan hanya secara individu tetapi juga membantu dalam menggerakkan ekonomi lokal dan nasional. Dengan adanya sumber pendapatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tekanan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas (Tobing *et al.*, 2023). Selain mendukung pengembangan lapangan kerja dan mengurangi urbanisasi, juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara sektor-sektor industri seperti adanya usaha baru atau dapat memperkuat sektor pertanian, perdagangan atau jasa (manufaktur/teknologi). Implementasi dari kebijakan transformasi pertanian di Indonesia berdampak pada peningkatan investasi infrastruktur pertanian, adopsi teknologi dan peningkatan produktifitas di wilayah tertentu (Rahman, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2009) tentang proses transformasi pertanian dan perubahan sosial pada masyarakat Samin di Bojonegoro menunjukkan bahwa transformasi pertanian yang terjadi di desa tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah pada masa orde baru yang mengedepankan pada peningkatan produksi pertanian yang mengharuskan penggunaan berbagai teknologi dan pupuk serta pestisida dalam jumlah yang terbatas. Masyarakat di desa Samin menyadari bahwa penggunaan bahan anorganik yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Selain peran pemerintah, transformasi pertanian yang terjadi pada masyarakat Samin juga tidak terlepas dari hubungan yang terjadi dengan dunia luar sehingga masyarakat Samin dapat mengenal berbagai teknologi baru yang sudah berkembang.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transformasi pertanian berperan penting dalam mendorong pembangunan perdesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketahanan pangan, dan memitigasi tekanan sosial, dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan dan dinamika sosial masyarakat setempat.

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan pada tingkat rumah tangga yang ditandai dengan ketersediaan pangan yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas, aman dikonsumsi, merata, dan terjangkau (Rahmawati, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi dimana semua orang dapat mengakses pangan, tersedia secara merata dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, pendapatan memainkan peran penting dalam menentukan pengeluaran, termasuk pola konsumsi pangan keluarga. Peningkatan pendapatan umumnya mendorong keberagaman pola konsumsi serta peningkatan konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang lebih tinggi (Hernanda *et al.*, 2017).

Ketahanan pangan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tujuan yang kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan dengan menggunakan skema *Prevalence of Undernourishment (PoU)* sehingga ketahanan pangan bagi masyarakat dapat diukur dengan *undernourishment* atau ketidakcukupan pangan (Irhamisyah, 2019).

Kajian tentang ketahanan pangan yang dilakukan oleh Fadila dan Nadia (2023) dengan menggunakan analisis *data google trends*, *K-Means Clustering* dan *LSTM* menunjukkan bahwa model *LSTM* dapat memprediksi perkembangan topik terkait ketahanan pangan di Indonesia dengan cukup bagus. Selain itu, topik terkait ketahanan pangan dari *Google Trends* dapat terbentuk 3 kluster oleh *K-Means Clustering*. Adapun

yang menjadi perhatian khusus adalah pada klaster 1 karena informasi terkait topik ketahanan pangan di Indonesia masih terbelah rendah. Wilayah yang tergolong pada klaster 1 adalah Papua, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Jawa barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat. Rendahnya ketahanan pangan untuk beberapa wilayah tersebut dikarenakan memiliki karakteristik yang beragam baik kondisi geografis, tingkat pembangunan ekonomi maupun akses terhadap teknologi pertanian dan informasi. Wilayah seperti Papua dan kepulauan lainnya mungkin memiliki keterbatasan logistik, wilayah Sulawesi, Kalimantan dan wilayah lainnya menghadapi tantangan sumberdaya alam sedangkan wilayah seperti DKI Jakarta tergantung pada pasokan pangan dari daerah lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Gufran and Firmanto (2024) tentang ketahanan pangan kaitannya dengan kearifan lokal Uma Lengge di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa kearifan lokal Uma Lengge berperan integral dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat adat Maria dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, pusat perencanaan dan dukungan sosial budaya. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan menjaga praktik tradisional, Uma Lengge membantu masyarakat mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan pangan, dan melestarikan budaya mereka. Kearifan lokal Uma Lengge mendukung strategi ketersediaan pangan, strategi pemanfaatan pangan dan strategi keterjangkauan pangan. Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh (Garibaldi and Frimawaty, 2024) tentang menuju sistem pangan berkelanjutan menunjukkan bahwa masyarakat lokal dan adat perlu dilibatkan dalam pengembangan strategi yang relevan. Artinya bahwa untuk menuju sistem pangan berkelanjutan perlu juga mempertimbangkan kearifan lokal dan adat setempat. Aktor atau orang yang memiliki peran dalam suatu adat perlu dilibatkan sebagai bentuk kerjasama dalam mengembangkan potensi pengembangan komoditi lokal yang mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan mempunyai peran yang vital bagi kehidupan suatu bangsa. Selain itu, komoditi pangan juga merupakan komoditi yang sangat penting bagi upaya untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Olehnya itu strategi ketahanan pangan nasional yang berorientasi pada swasembada pangan perlu diarahkan juga untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk sehingga mampu bersaing di pasar global.

Namun karena terjadinya perubahan iklim global, pertumbuhan populasi penduduk, dan degradasi lingkungan maka ketahanan pangan berkelanjutan menjadi tantangan global yang memerlukan strategi yang lebih komprehensif. Kendala lain yang dihadapi ketahanan pangan nasional adalah lemahnya daya tahan *demand* karena masih mengharapkan impor yang lebih tinggi dan tidak dilakukannya strategi portofolio secara sistematis dalam kebijakan ketahanan pangan nasional (Miyasto, 2014).

Tantangan yang dihadapi untuk menuju ketahanan pangan berkelanjutan dilihat dari sisi penyediaan pasokan, minimal ada lima hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: (i) sumberdaya alam, semakin bertambahnya populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi maka semakin tingginya persaingan pemanfaatan lahan seperti sumberdaya perairan dan air, konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan atau untuk kegiatan perekonomian; (ii)

Berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menurut Suryana (2014) arah dan strategi kebijakan menuju ketahanan

pangan berkelanjutan dibagi atas 3 strategi ketersediaan pangan, strategi keterjangkauan pangan dan strategi pemanfaatan pangan.

1. **Strategi ketersediaan pangan** yang dapat dilakukan yaitu: *Pertama*, membangun penyediaan pangan berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional. Jika sumber pangan dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maka dapat dilakukan impor. Menurut Suryana (2014) untuk melakukan strategi tersebut maka perlu: (i) meningkatkan produksi pangan penting secara ekonomi, sosial, dan politik dengan menggunakan sumberdaya domestik secara optimal; (ii) membangun cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang kuat; (iii) perlu menetapkan kebijakan impor secara cermat jika memang diperlukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam negeri yang tidak berdampak negatif terhadap agribisnis domestik. *Kedua*, memberdayakan usaha skala kecil yang bergerak di bidang pangan yang merupakan ciri dominan pada perekonomian pertanian Indonesia dengan cara menyelaraskan atau mengintegrasikan aktifitas usaha pangan skala kecil ke dalam rantai pasok pangan (*food supply chain*) dan menghimpun usahatani skala kecil sehingga mencapai skala ekonomi dengan menerapkan rekayasa sosial ekonomi melakukan kontrak dengan petani pada suatu luasan dengan skala tertentu. *Ketiga*, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis, penyuluhan terkait dengan diversifikasi tanaman untuk efisiensi usaha dan mempercepat diseminasi teknologi. *Keempat*, mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan, pengolahan, dan distribusi pangan. Peningkatan aksesibilitas petani secara fisik dan ekonomi terhadap teknologi pengolahan pangan tersebut mutlak diperlukan. Selain itu, perlu upaya untuk mengurangi pemborosan pangan melalui gerakan pengurangan pemborosan pangan secara sistematis dan masif ke berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan sosial budaya.
2. **Strategi pemanfaatan pangan** yang dapat dilakukan yaitu: *Pertama*, mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan berdasarkan potensi sumberdaya pangan lokal, keragaman makanan daerah, dan kearifan lokal, dengan acuan pola konsumsi pangan B2SA. Hal yang sama dinyatakan oleh Rosyadi and Purnomo (2012); Darwis (2014) bahwa perlu mendorong diversifikasi pertanian dengan menjamin ketersediaan, aksesibilitas untuk mendukung pengembangan komoditas non beras. *Kedua*, memperbaiki status gizi masyarakat melalui pengayaan atau fortifikasi untuk zat gizi tertentu pada pangan yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat, seperti beras, minyak goreng, dan garam dan, *Ketiga*, mengupayakan agar tercipta kemampuan untuk menjamin pangan yang diedarkan atau diperdagangkan kepada masyarakat mempunyai karakteristik aman, higienis, berkualitas, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
3. **Strategi Keterjangkauan Pangan** menyangkut bagaimana individu dan masyarakat dapat menjangkau atau mengakses pangan baik secara fisik maupun secara ekonomi. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu: *Pertama*, memperkuat dan memfasilitasi pengembangan pemasaran dan perdagangan pangan di perdesaan yang efisien. *Kedua*, pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. *Ketiga*, menggunakan instrumen kebijakan perdagangan internasional pangan dengan mendahulukan pertimbangan kepentingan nasional dan selaras dengan kesepakatan internasional. *Keempat*, revitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat yang dikelola dengan prinsip efisiensi ekonomi dengan tetap memiliki fungsi sosial. *Kelima*, pemberian bantuan pangan bersubsidi sesuai dengan pola

konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang kekurangan pangan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan strategi menuju ketahanan pangan berkelanjutan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Hikmah and Pranata, 2023) tentang *cooperative farming*; sebuah strategi menuju ketahanan pangan berkelanjutan menyimpulkan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan adalah mempertahankan kestabilan air, energi dan pertanian serta ketersediaan akses distribusi untuk menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan model *cooperative farming* melalui aspek sosial, ekonomi dan teknologi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transformasi kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan masa pemerintahan yang merupakan langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan yang selaras dengan tantangan dan dinamika global.
2. Ketahanan pangan merupakan hal yang perlu menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan pertanian
3. Strategi untuk ketahanan pangan berkelanjutan dibagi atas tiga yaitu strategi untuk ketersediaan pangan, strategi pemanfaatan pangan, dan strategi keterjangkauan pangan.

Beberapa saran kebijakan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Mendorong adopsi teknologi digital dan pertanian presisi untuk meningkatkan produksi pangan
2. Mengembangkan model pertanian terpadu untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumberdaya
3. Mengembangkan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal
4. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, M. and Bambang, W. (2012) *Pengantar Gizi Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Briones, R. and Felipe, J. (2013) 'Agriculture and Structural Transformation in Developing Asia: Review and Outlook', *Asian Development Bank*, (363), p. 39. Available at: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30380/ewp-363.pdf>.
- Darwis, V. (2014) 'Dinamika Keragaan Kemiskinan Di Desa Patanas Dan Upaya Mengatasinya', *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 11(1), pp. 118–129. Available at: <https://doi.org/10.20961/sepa.v11i1.14162>.
- Fahmi, F.Z. (2021) *Transformasi Pedesaan*. Available at: <https://amf.or.id/transformasi-perdesaan>.
- FAO (2019) *The State of Food Security and Nutrition in the World 2019*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Garibaldi, S.A. and Frimawaty, E. (2024) 'Menuju sistem pangan yang berkelanjutan (bergerak dari pangan sebagai komoditas menuju sistem pangan yang berkelanjutan

- (bergerak dari pangan sebagai komoditas)', *Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), pp. 117–125. Available at: <https://doi.org/10.61511/pips.v1i2.2024.1003>.
- Gemmell, N. (2017) *Ilmu Ekonomi Pembangunan Beberapa Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Gufran and Firmanto, T. (2024) 'Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Uma Lengge Masyarakat Adat Maria Kabupaten Bima', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), pp. 13–41. Available at: <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.282>.
- Hernanda, E.N.P., Indriani, Y. and Kalsum, U. (2017) 'Income and Food Security of Rice Farmer Households in Food Insecurity Village', *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, 5(3), pp. 283–291. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v5i3.1641>.
- Hikmah, N. and Pranata, E.O. (2023) 'Cooperative Farming: Sebuah Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan', *TheJournalish : Social and Government*, 4(5), pp. 120–137. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.604>.
- Irhamisyah, F. (2019) 'Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional', *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), pp. 45–54. Available at: <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>.
- Kaputra, I. (2013) 'Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Pertanian & Kketahanan Pangan', *Jurnal Strukturasi*, 1(1), pp. 25–39.
- Kesa, D.D. and Lee, C.-W. (2013) 'Kebijakan Sektor Pertanian sebagai Awal Kebangkitan Ekonomi (Studi Kasus Taiwan Dalam Mengelola Komoditas Padi)', *Jurnal Vokasi Indonesia*, 1(1), pp. 44–73. Available at: <https://doi.org/10.7454/jvi.v1i1.7>.
- Miyasto (2014) 'Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 2(1), pp. 17–34. Available at: <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/151>.
- Mukhlis, Wisra, R.F., *et al.* (2023) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Padi Organik Di Kecamatan Harau', *Jurnal Ilmiah Agribios*, 21(2), pp. 183–190. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/agribios.v21i2.3680> Abstrak.
- Mukhlis, Hendriani, R., *et al.* (2023) 'Analisis Pendapatan Petani Model Usahatani Terpadu Jagung-Sapi Di Kecamatan Payakumbuh', *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 23(2), pp. 254–261. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25181/jppt.v23i2.2953>.
- Murdiyanto, E. (2020) *Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN "Veteran" Yogyakarta Press. Available at: [http://eprints.upnyk.ac.id/24094/1/Sosiologi Pedesaan-Eko MURdiyanto.pdf](http://eprints.upnyk.ac.id/24094/1/Sosiologi%20Pedesaan-Eko%20MURdiyanto.pdf).
- Nurhapsa *et al.* (2025) 'Analisis keberlanjutan agribisnis padi sawah di desa allita, kecamatan mattiro bulu, kabupaten pinrang, provinsi sulawesi selatan', *Agribios*, 23(01), pp. 40–48. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/agribios.v23i1.5964>.
- Rahman, A. (2022) 'Agricultural Transformation in Indonesia: Evaluation of Policy Implementation and Challenges Faced', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), pp. 691–700. Available at: <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i2.50367>.
- Raihan, R.Z., Kastaman, R. and Tensiska, T. (2020) 'Menentukan Kondisi Ketahanan Pangan Jawa Barat Wilayah IV Menggunakan Food Security Quotient (FSQ)', *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 4(1), pp. 68–76. Available at:

- <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.01.7>.
- Rosyadi, I. and Purnomo, D. (2012) 'Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Desa Tertinggal', *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 13(2), pp. 303–315. Available at: <https://doi.org/10.23917/jep.v13i2.176>.
- Salikin, K. (2011) *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. 6th edn. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sinaga, R.J.R., Lubis, S.N. and Darus, M.B. (2017) 'Ketahanan pangan rumahtangga adalah kemampuan rumahtangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari.', *JJournal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 2(5), pp. 1–13.
- Suryana, A. (2014) 'Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian', *FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI*, 32(2), pp. 123–135. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.123-135>.
- Taufik, A. *et al.* (2021) 'Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Majene', *Kybernology : Journal of Government Studies*, 1(2), pp. 178–194. Available at: <https://doi.org/10.26618/kjgs.v1i2.7192>.
- Tobing, I. *et al.* (2023) 'Transformasi Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan', *Edunomika*, 07(01), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7748>.
- Wahyudi, K.D. (2012) 'Strategic Policies for Agricultural Businesses in the Framework of Increasing Production and Reducing Poverty', *Majalah Ilmiah 'DIAN ILMU' (Local journal)*, 11(2), pp. 78–91.
- Widodo, S. (2009) 'Proses Tranformasi Pertanian dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Samin Di Bojonegoro', *Embryo*, 6(1), pp. 57–66.